



RENCANA KERJA

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2026

**KUPANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana kerja ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2026 ini diucapkan terima kasih.

Kupang, Januari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi

2/ Sekretariat Daerah Provinsi NTT



Djoese S.M. Nai Buti, S.PT., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTA ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

Bab II HASI EVALUASI KINERJA BIRO ORGANISASI..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Oganisasi Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Biro Organisasi 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Orgaisasi 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPBD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT..... 39

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH43

4.1 Sasaran Dan Program/Kegiatan Biro Organisasi 43

4.2 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan 47

4.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 48

BAB V PENUTUP..... 54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja-PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Renja merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Renstra. Rencana kerja tahun 2026 memiliki arti strategis karena merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Biro Organisasi tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Renja Biro Organisasi adalah dokumen perencanaan Biro Organisasi untuk tahun 2026. Proses Penyusunan Renja Biro Organisasi berpedoman pada Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2024-2026, hasil evaluasi hasil Renja Biro Organisasi Tahun 2023 dan 2024. Dengan mempedomani Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Biro Organisasi dengan Renstra Biro Organisasi.

Disamping itu juga, Renja Tahun 2026 harus mengacu pada hasil evaluasi hasil Renja Biro Organisasi Tahun 2023 dan 2024 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang disusun dalam rancangan awal Renja Biro Organisasi dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Biro Organisasi. Penyusunan rancangan awal Renja Biro Organisasi mencakup: analisis gambaran pelayanan Biro Organisasi dan hasil

evaluasi Renja Biro Organisasi Tahun 2024. Selanjutnya Renja Biro Organisasi Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Biro Organisasi yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkup Biro Organisasi.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Tahunan Biro Organisasi Tahun 2026.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi dan Capaian Renstra Biro Organisasi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan Biro Organisasi
 - 4.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan
 - 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BIRO ORGANISASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi dan Capaian Renstra Biro Organisasi.

Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan maupun Rencana Strategis. Agar hasil evaluasi dapat memberikan data rerata terhadap capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan untuk kepentingan perencanaan, maka minimal evaluasi dilaksanakan selama 2 tahun terakhir yaitu realisasi dana tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Realisasi Dana Tahun 2024 dan 2025

Tabel 2.1.
Hasil evaluasi capaian kinerja Biro Organisasi tahun 2024 dan 2025.

No	Nama Program dan Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	TAHUN ANGGARAN 2024			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	706.014.973	649.992.087	92,06
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	172.340.650	171.195.150	99,34
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perancangan perangkat daerah	25.197.950	25.194.950	99,99
1.2	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	31.230.800	31.070.800	99,49
1.3	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	23.716.600	23.044.600	97,17
1.4	Sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	92.195.300	91.884.800	99,66
2	Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	343.644.323	289.693.250	84,30
3.1	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.208.840	38.204.000	99,99
3.2	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100,00
3.3	Sub kegiatan penyediaan bahan material	44.235.563	44.227.353	99,98
3.4	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	25.009.000	24.989.947	99,92
3.5	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	233.790.920	179.871.950	76,94
4	Kegiatan Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	25.000.000	24.908.400	99,63
4.1	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	25.000.000	24.908.400	99,63
5	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	65.030.000	64.720.000	99,52

No	Nama Program dan Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
5.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	3.780.000	3.780.000	100,00
5.3	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57.250.000	57.250.000	100,00
6.	Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100.000.000	99.475.287	99,48
6.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	54.113.500	53.807.287	99,43
6.2	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	45.886.500	45.668.000	99,52
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.118.233.027	1.043.251.500	93,29
1	Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	363.329.950	352.178.196	96,93
1.1	Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi	125.000.700	118.219.793	94,58
1.2	Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota	30.056.250	28.790.250	95,79
1.3	Sub kegiatan penataan analisis jabatan	208.273.000	205.168.153	98,51
2	Kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	754.903.077	691.073.304	91,54
2.1	Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi	102.678.125	92.027.570	89,63
2.2	Sub kegiatan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	255.606.250	240.908.851	94,25
2.3	Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan budaya kerja	52.678.125	13.797.346	26,19
2.4	Sub kegiatan pengelolaan tata laksana pemerintahan	130.356.250	124.569.630	95,56
2.5	Sub kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	213.584.327	198.841.907	93,10
	Total	1.824.248.000	1.693.243.587	92,82
TAHUN ANGGARAN 2025				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	728.984.097		
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	243.775.197		
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perancangan perangkat daerah	21.883.000		
1.2	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	29.915.700		
1.3	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	21.097.500		
1.4	Sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	170.878.997		
2	Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	295.236.700		
3.1	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.235.300		
3.2	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000		
3.3	Sub kegiatan penyediaan bahan material	40.451.500		
3.4	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	25.900.000		
3.5	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	186.249.900		

No	Nama Program dan Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4	Kegiatan Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	34.200		
4.1	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	34.200		
5	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	63.460.400		
5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	4.000.400		
5.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	3.780.000		
5.3	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	55.680.000		
6.	Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	126.477.600		
6.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	44.103.800		
6.2	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	42.373.800		
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.315.304.902		
1	Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	475.386.100		
1.1	Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi	274.998.400		
1.2	Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota	22.964.300		
1.3	Sub kegiatan penataan analisis jabatan	204.423.400		
2	Kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	839.918.802		
2.1	Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi	183.859.502		
2.2	Sub kegiatan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	249.999.700		
2.3	Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan budaya kerja	11.200.000		
2.4	Sub kegiatan pengelolaan tata laksana pemerintahan	194.860.600		
2.5	Sub kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan publik	199.999.000		
	Total	2.044.288.999		

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
 - a. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memenuhi hasil kinerja

Pada tahun 2024 Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya Permen PAN RB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak serta tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB telah ditetapkan dalam Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu presentase PD memiliki predikat RB “Istimewa” ((kategori AA/Nilai = 80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik) dalam bentuk rencana aksi terhadap Roadmap RB Pemerintah Provinsi NTT Reformasi Tahun 2024-2026.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 82 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemprov NTT Tahun 2024-2026.

- b. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Pada Tahun 2024

Level Maturitas Kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun 2022 yaitu 40,67 atau kategori tinggi. “Persentase Level Maturitas Kelembagaan” pada Tahun 2024 adalah sebesar 40,67 dan capaian kinerja 90,37%. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjamin mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) Pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; k.) budaya organisasi.

Masih terdapat perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan Upaya Peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan system kerja

pada 11 (sebelas) variable yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

- a. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik. Pada tahun 2024 realisasi indeks pelayanan publik adalah 3,56 (baik) dari target 2,85 (cukup). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 3,60 (baik) maka terjadi penurunan sebesar : 0,04 disebabkan realisasi indeks pelayanan publik menggunakan data tahun 2023 yaitu 3,60 (B) Kategori baik. Pada tahun 2024 PEKPPP telah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluator Provinsi dan Tim Evaluator Nasional yang menghasilkan indeks PEKPPP Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 adalah 3,56 (B) kategori baik. Sedangkan Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2025 maka sudah mencapai target sebesar 0,36 poin.

- b. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024.

Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Tematik sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional

c. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Pada tahun 2024 target Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja A "memuaskan" adalah 12% dengan realisasi 35,89% atau capain 299,08% Perangkat Daerah telah memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A "memuaskan" antara lain: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 25 PD memperoleh predikat BB.

Pada Tahun 2024 realisasi indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan RB Tematik adalah 72,72% dari target yang ditetapkan sebesar 15,15% atau capaian 480%. Hal ini disebabkan target PD yang menerapkan RB tematik pada tahun 2024 sebanyak 5 PD dengan pembagi 33 PD sedangkan realisasi PD yang menerapkan RB tematik sebanyak 24 PD dengan pembagi yang sama yaitu 33 PD. Jika dibandingkan tahun 2023 tidak dapat dilakukan karena Tahun 2023 adalah tahun peralihan pelaksanaan RB dari PMPRB ke RB General dan RB Tematik. Sehingga pada tahun tersebut tidak ditetapkan persentase PD yang menerapkan RB tematik.. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 sebesar 45,45%, realisasi tahun 2024 telah melampaui sebesar 160%. Naiknya realisasi indikator ini disebabkan para PD pengampu RB tematik melaksanakan penyusunan rencana aksi RB tematik yang merupakan alat ukur evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024

- a. Ketidaktersedian anggaran untuk melakukan penilaian Tingkat kematangan perangkat daerah
 - b. Terjadi perubahan regulasi untuk pelaksanaan *Road Map* RB
4. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024
- a. Penyesuaian indikator sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dokumen perencanaan Biro Organisasi sehingga sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - b. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap perangkat daerah dengan cara pendampingan langsung atau bimtek/sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota sebagai alat ukur capaian kinerja perangkat daerah kabupaten/kota;
 - d. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kabupaten/kota melalui fasilitas zoom ataupun dengan cara pendampingan langsung atau bimtek/sosialisasi.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.
- a. Koordinasi dan komitmen antara Pejabat di biro organisasi terkait pelaksanaan tugas terhadap perangkat daerah.
 - b. Perlu diberikan Pembinaan yang intensif kepada perangkat daerah melalui Bimtek atau sosialisasi.

Table 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Pencapaian Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	87,47%	100%	92,06%	92,06%	100%	93,17%	93,17%
01.1. 01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	100%	99,59	100%	99,34%	99,34%	100%	99,64%	99,64%
01.1. 01.01 .	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
01.1. 01.02 .	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%

01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	75,00%
01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	75,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM aparatur Biro Organisasi	100%	-	100%	-	-	-	100%	100%	33,33%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	-	2 orang	-	-	-	2 orang	2 orang	33,33%
01.1.06	Kegiatan Administrasi	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Biro	100%	83,04%	100%	84,30%	84,30%	100%	100%	89,11%	89,11%

	Umum Perangkat Daerah											
01.1.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	3 Paket	75,00%	
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%	
01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	3 Paket	75,00%	
01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%	
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%	
01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan pra sarana kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi biro	100%	79,91%	100%	99,48%	99,48%	-	-	59,79%	59,79%	
01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	

01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan Lainnya	Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-	2 unit	50,00%
01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	99,44%	100%	99,52%	99,65%	99,52%	100%	99,65%	99,65%
01.1.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
01.1.08.04	Penyediaan Pelayanan Kantor	Jasa Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	79,91%	100%	99,48%	93,13%	99,48%	100%	93,13%	93,13%

01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit Kendaraan	1 Unit Kendaraan	1 Unit Kendaraan	100%	1 Unit	1 Unit	100%
01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	100%	100%	100%
02.	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	100%	84,91 %	100%	93,29%	92,73%	92,73%	92,73%
02.1.01.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat ukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.1.01.01.	Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.1.01.01.	Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

02.1. 01.03	Sub Penataan Jabatan	Kegiatan Analisis	- Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi - Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.1. 02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Indeks Pelayanan Publik	3,2 (B-)	3,6 (B)	2,85 (C)	3,6 (B)	126,31%	3,1 (B-)	3,6 (B)	112,5%
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan"	45,45 % (15 PD)		15,15%			30,30%		
			Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A	57,57% (19 PD) 24 %		45,45%			51,51%	18%	

02.1.02.01.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.1.02.03.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	• Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di PD • Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

02.1. 02.02 .	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implelementasi SAKIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.1. 02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implelementasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implelementasi tatalaksana pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

02.1. 02.05 .	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi pelayanan publik PD • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi pelayanan publik Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
---------------------	---	---	------	------	------	------	-------	------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

Hasil analisa terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Angka/Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Biro Organisasi Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewah" (Kategori AA/Nilai = 80-90)		45,45	51,51	57,57	-	-	-	
2.	Level Maturitas Kelembagaan		45	47	49	40,67	-	-	
3.	Indeks Pelayanan Publik		2,85	3,1	3,2	3,56	-	-	
4.	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan RB Tematik		15,15	30,30	45,45	72,72	-	-	
5.	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A		12	18	24	35,89	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

- A. Isu – isu strategis yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sesuai tuntutan reformasi birokrasi untuk percepatan implementasi reformasi birokrasi pada tahun 2026 antara lain :
1. Belum optimalnya pemanfaatan informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam penempatan pegawai;
 2. Belum semua perangkat daerah menerapkan standarisasi tata laksana pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
 4. Perangkat Daerah belum maksimal dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan di daerah;
 5. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- a. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam penataan kelembagaan, ketata Laksanaan dan kepegawaian;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan ketata Laksanaan dan pelayanan publik;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dampak perekonomian nasional maupun global yang sedang terpuruk, maka pagu indikatif sudah ditentukan oleh Bapperida Provinsi NTT, sehingga Rancangan awal RKPD Biro Organisasi harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	3	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4	100%	5	669.103.923,07	6	12
1.	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	3	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	4	100%	5	149.929.745,14	6	
1.1	1.1	Penyusunan Perencanaan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	3	Jumlah Perencanaan Daerah	4	1 Laporan	5	21.883.000,00	6	
1.2	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1 Dokumen	5	29.915.700,00	6	
1.3	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1 Dokumen	5	21.097.500,00	6	
1.4	1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jalan El Tari Nomor 52	3	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar	4	5 Laporan	5	170.878.997,00	6	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Oebufu Kota Kupang	4 Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	6	7 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Oebufu Kota Kupang	9 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	11	12
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Peningkatan SDM Aparatur Biro Organisasi	100%	20.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Peningkatan SDM Aparatur Biro Organisasi	100%	20.000.000,00	
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 pegawai	20.000.000,00	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 pegawai	20.000.000,00	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Biro	100%	307.954.177,93	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Biro	100%	307.954.177,93	
3.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.235.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.235.300,00	
3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	
3.3	Penyediaan Bahan/Material	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.451.500,00	Penyediaan Bahan/Material	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.451.500,00	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)				
1	3.4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	12 kali	25.900.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 kali	25.900.000,00				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	186.249.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	186.249.000,00				
	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi a dministrasi biro		25.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi a dministrasi biro		25.000.000,00				
	4.1	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00			
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.220.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.220.000,00				
	5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.400.000,00			
	5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.780.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.780.000,00			
	5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Pelayanan Umum yang Disediakan	1 Laporan	55.680.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	55.680.000,00			

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Umum Kantor yang Disediakan			
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000,00	
6.1	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda 4	15.603.800,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda 4	15.603.800,00	
6.2	Pemeliharaan Mesin lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	12 unit	15.603.800,00	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	15.603.800,00	
II	Program Organisasi Penataan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA)	45,45%	639.430.493,07	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA)	45,45%	639.430.493,07	

Rancangan Awal RKPD												
NO		Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	1.	Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Indeks Publik • Persentase Perangkat Daerah Menerapkan RB Tematik • Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan"	2,85% 15,15% 12%	426.286.993,07	Program Organisasi Penataan	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Indeks Pelayanan Publik • Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik • Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan"	2,85% 15,15% 12%	426.286.993,07	12
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pembinaan Reformasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Presentase pendampingan dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota	100% 100%	56.571.743,07	Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten/Kota	100%	56.571.743,07	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan 2	Lokasi 3	Indikator kinerja 4	Target Capaian 5	Pagu Indikatif (Rp) 6	Program/ Kegiatan 7	Lokasi 8	Indikator kinerja 9	Target Capaian 10	Kebutuhan Dana (Rp) 11	
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di PD - Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di Kabupaten/Kota	100%	50.000.000,00	Sub Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di PD - Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di Kabupaten/Kota	100%	50.000.000,00	-
1.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi SAKIP Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi SAKIP Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	12
1.5	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi pelayanan publik PD - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi pelayanan publik Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi pelayanan publik PD - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi pelayanan publik Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	
II	Kegiatan Kelembagaan Analisis Jabatan	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat ukuran	100%	213.143.500,00	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat ukuran	100%	213.143.500,00	
2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Provinsi	100%	90.000.000,00	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan	100%	90.000.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Perangkat Daerah Provinsi			
2.2	Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.571.750,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.571.750,00	
2.3	Sub Kegiatan Analisis Jabatan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	- Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi - Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	- Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi - Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	106.571.750,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Organisasi merupakan unsur pendukung pemerintah sehingga stakeholdernya lebih banyak perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten/Kota se NTT dan lembaga atau instansi terkait lainnya sehingga Usulan program dan kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dari para Pemangku Kepentingan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada.

Tabel 2.5.
Usulan program dan kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para Pemangku Kepentingan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja		
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Peningkatan SDM Aparatur Biro Organisasi		
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
9.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Biro		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
12.	Penyediaan Bahan/Material	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
13.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
15.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi biro		
16.	Pengadaan Meubel	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
18.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
22.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
24.	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
25.	Program Penataan Organisasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA)		
26.	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Indeks Pelayanan Publik • Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik • Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan"		
27.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oeufu Kota Kupang	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Birokrasi tematik Kabupaten/Kota		
28.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	• Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solid dan nilai dasar ASN berahklak di PD • Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solid dan nilai dasar ASN berahklak di Kabupaten/Kota		
29.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah • Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Kabupaten/Kota		
30.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	• Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Kabupaten/Kota		
31.	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	- Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelayanan publik PD - Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelayanan publik Kabupaten/Kota		
32.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat ukuran		
33.	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi		
34.	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	Presentase fasilitas dan monitoring evaluasi penataan		

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
35.	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	- Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi - Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dimaksudkan agar mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pada Biro Organisasi sudah sesuai/sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam rangka tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3.1.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Pemerintah telah mencanangkan prioritas nasional di bidang Reformasi Birokrasi yang diturunkan dari visi Nawacita point kedua, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ditingkat daerah, maka program prioritas yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Program peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan dengan kegiatan prioritas, sebagai berikut :
 1. Penerapan sistem nilai dan integrasi birokrasi;
 2. Pengawasan yang independen dan profesional;
 3. Peningkatan keuangan dan kinerja.
- b. Program pelaksanaan *road map* Reformasi Birokrasi, peningkatan asistensi, fasilitasi, bimbingan teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 1. Penguatan pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional;
 2. Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa;
 3. Sistem manajemen kinerja pembangunan nasional;
 4. Penerapan manajemen ASN;
 5. Penerapan tata kelola birokrasi;
 6. Penataan kelembagaan birokrasi.
- c. Program penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;
 2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Biro Organisasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas di bidang organisasi dan tata laksana telah menetapkan tujuan dan sasaran Biro Organisasi Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan :
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis
- b. Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja rencana kerja Biro Organisai Setda Provinsi Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1-Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Biro Organisasi

No	Prioritas 2026	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)
					Level Maturitas Kelembagaan
					Indeks Pelayanan Publik
					Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik
					Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A

Tabel 3.2
Tujuan Biro Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis	Mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%
		Menyediakan formasi jabatan sesuai kebutuhan	100%
		Nilai SAKIP meningkat	BB (70)
		Indeks RB meningkat	BB (70)
		Merevisi SOP-AP agar sesuai dengan Peta Proses Bisnis	100%
		Mewujudkan Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	100%

Tabel 3.3
Sasaran Biro Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	57,57
		2. Level Maturitas Kelembagaan	49
		3. Indeks Pelayanan Publik	3,2 (Baik)
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	45,45
		5. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A	24

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	57,57
		Level Maturitas Kelembagaan	49
		Indeks Pelayanan Publik	3,2 (Baik)

		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	45,45
		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A	24

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan Biro Organisasi

a. Prioritas Pembangunan.

Berdasarkan Rancangan Tema RKPD Tahun 2026, yaitu **Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Dasar**, maka terdapat 4 (empat) Prioritas Daerah (PD) RKPD Tahun 2026 yaitu : **Prioritas Pertama** : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; **Prioritas Kedua** : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; Prioritas Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; Prioritas Keempat : Reformasi Birokrasi.

Secara internal prioritas pembangunan pada Biro Organisasi adalah penataan kelembagaan dan analisis jabatan, Tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

b. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah disepakati 193 negara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs terdiri dari 17 goals yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk **kemiskinan**.
2. Menghilangkan **kelaparan**, mencapai **ketahanan pangan dan gizi** yang baik, serta meningkatkan **pertanian** berkelanjutan.
3. Menjamin **kehidupan yang sehat** dan meningkatkan **kesejahteraan** seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas **pendidikan** yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai **kesetaraan gender** dan memberdayakan kaum Perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan **air bersih dan sanitasi** yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin **akses energi** yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

8. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun **infrastruktur** yang tangguh, meningkatkan **industri** inklusif dan berkelanjutan serta mendorong **inovasi**.
10. Mengurangi **kesenjangan** intra dan antar Negara.
11. Menjadikan **kota dan pemukiman** inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin **pola produksi dan konsumsi** yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah & tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi **perubahan iklim** dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan **sumber daya kelautan dan samudera** untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan **ekosistem daratan**, mengelola **hutan** secara lestari, menghentikan **degradasi lahan**, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan **akses keadilan** untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi **kemitraan global** untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara yang turut menggarap konsep SDGs, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan dan mencapainya pada tahun 2030. Wujud komitmen tersebut, ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Perpres itu menjadi landasan dan payung hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan TPB/ SDGs. Amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 telah menghasilkan tiga (3) dokumen penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2019, Rencana Aksi Daerah (RAD)¹ dan Peta Jalan SDGs menuju 2030. Salah satu upaya penting dan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengarusutamakan target TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Sebanyak 94 target TPB/SDGs telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Selanjutnya target SDGs yang diintegrasikan makin banyak, dari 164 target

TPB/SDGs yang relevan sebanyak 124 target telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020 – 2024. Pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs nasional (RAN) dan daerah (RAD).

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mendukung pencapaian target SDGs. Komitmen tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.

Biro Organisasi tidak memiliki keterkaitan langsung pencapaian untuk tingkat Provinsi NTT, tetapi Biro Organisasi mendukung pencapaian target SDGs melalui penataan kelembagaan, penyusunan peta proses bisnis, penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah provinsi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tersebut diatas untuk Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan public yang berkualitas.

Peta proses bisnis yang disusun akan mempermudah koordinasi dan integrasi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target SDGs.

Berdasarkan analisa yang terdapat dalam RPJMD maka Misi kelima mendukung pencapaian 5 tujuan SDGs yaitu 1).Mengakhiri segala bentuk **kemiskinan**, 3). Menjamin **kehidupan yang sehat** dan meningkatkan **kesejahteraan** seluruh penduduk semua usia, 5). Mencapai **kesetaraan gender** dan memberdayakan kaum perempuan dan 16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan **akses keadilan** untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Dalam kaitannya dengan korelasi antara SDGs dengan misi kelima, maka tugas Biro organisasi memiliki korelasi dengan tujuan ke 16 kode indikator 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan dengan 3 indikator yaitu persentase SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik. 18. Pengurangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Secara internal desain prioritas program dan kegiatan pada Biro Organisasi tahun 2026 memiliki korelasi tidak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Desain prioritas program dan kegiatan pada Biro Organisasi tahun 2026 mendukung upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi termasuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui kegiatan penataan kelembagaan, penyusunan Peta Proses Bisnis, penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah provinsi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tersebut diatas untuk Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu kegiatan prioritas yang mendukung kinerja lintas sektor dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan adalah penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT. Peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT menggambarkan proses utama dan sub proses yang harus dilaksanakan secara terintegrasi antara perangkat daerah. Peta proses utama yang memiliki keterkaitan dengan pengurangan kemiskinan adalah proses utama penanggulangan kemiskinan dan stunting. Pada tahun 2026 ini akan dilakukan fasilitasi terhadap penyusunan peta proses pada 35 perangkat daerah yang belum menyusun peta proses bisnis.

Tabel 4.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan Biro Organisasi

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penataan Organisasi Kegiatan: 1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan a. Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi b. Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota c. Sub kegiatan penataan analisis jabatan 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja a. Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi b. Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan budaya kerja c. Sub kegiatan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja d. Sub kegiatan pengelolaan tata laksana pemerintahan

		e. Sub kegiatan fasillitasi peningkatan pelayanan publik
--	--	--

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan.

Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTT sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan. Dari keenam prioritas pembangunan tersebut, prioritas pembangunan kelima yaitu Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi merupakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi sesuai tugas fungsi yang dimiliki. Rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBnsE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi.	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	669,103,923.07	
		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.929.745,14	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkata Daerah	307,954,177.93	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	25,000,000.00	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,220,000.00	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,000,000.00	
		Program Penataan Organisasi	639,430,493.07	
		Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	426,286,993.07	
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	56.571.743,07	
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksana Budaya Kerja	50,000,000.00	

		e. Sub kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan publik
--	--	---

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan.

Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTT sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan. Dari keenam prioritas pembangunan tersebut, prioritas pembangunan kelima yaitu Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi merupakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi sesuai tugas fungsi yang dimiliki. Rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBnsE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi.	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	669,103,923.07	
		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.929.745,14	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkata Daerah	307,954,177.93	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	25,000,000.00	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,220,000.00	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,000,000.00	
		Program Penataan Organisasi	639,430,493.07	
		Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	426,286,993.07	
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	56.571.743,07	
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksana Budaya Kerja	50,000,000.00	

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	100%	669,103,932.07	Dana Alokasi Umum		100%	736,014,325,277
01.1.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	100%	149,929,745.14	Dana Alokasi Umum		100%	164,922,719,654
4.01.1.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan SDM Aparatur Biro Organisasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000
4.01.1.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentasi Pelayanan Administrasi Umum Biro	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufu Kota Kupang	1 Dokumen	307.954.177,93	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	338.749.595,723
4.01.1.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana	Jalan El Tari Nomor 52	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Perkantoran Yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi biro	Oebufo Kota Kupang							
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufo Kota Kupang	5 Laporan	62.220.000,00	Dana Alokasi Umum		5 Laporan	68.442.000	
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufo Kota Kupang		100.000.000,00	Dana Alokasi Umum			110.000.000	
4.01.02	Program Organisasi Penataan			100%	639.430.493,07			100%	703.373.542,377	
	Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Publik	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufo Kota Kupang	2 Pegawai	213.143.500,00	Dana Alokasi Umum		2 Pegawai	234.457.850	
		Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Yang RB Tematik		100%	106.571.743,07	Dana Alokasi Umum		100%	117.228.917,377	
		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan"	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufo Kota Kupang	12 Paket	106.571.750,00	Dana Alokasi Umum		12 Paket	117.228.917,377	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi	Jalan El Tari Nomor 52 Oebufo Kota Kupang	2 Dokumen	42.571.743,07	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	46.828.917,377	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Perangkat Daerah								
		Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten/Kota	Jalan Nomor Oebufu Kupang El Tari 52 Kota	12 Paket	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.400.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Budaya Kerja	Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di PD	Jalan Nomor Oebufu Kupang El Tari 52 Kota	12 Kali	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Kali	38.500.000	
		Presentase monitoring evaluasi penerapan nilai organisasi solidier dan nilai dasar ASN berahklak di Kabupaten/Kota	Jalan Nomor Oebufu Kupang El Tari 52 Kota	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	16.500.000	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah		100%	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	99.000.000	
		Presentase pendampingan dan	Jalan Nomor El Tari 52	1 Paket	16.571.750,00	Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.228.925	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		monitoring evaluasi implemantasi SAKIP Kabupaten/Kota	Oebufo Kupang Kota							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah	Jalan Nomor Oebufo Kupang El Tari 52 Kota	-	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum				93.500.000
		Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi tatalaksana pemerintahan Kabupaten/Kota		100%	21.571.750,00	Dana Alokasi Umum			100%	23.728.925
	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi pelayanan publik PD	Jalan Nomor Oebufo Kupang El Tari 52 Kota	1 Laporan	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum			1 Laporan	93.500.000
		Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implemantasi pelayanan publik Kabupaten/Kota	Jalan Nomor Oebufo Kupang El Tari 52 Kota	1 Laporan	21.571.750,00	Dana Alokasi Umum			1 Laporan	23.728.925

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat ukuran	Jalan El Tari Nomor 52 Kota Kupang	1 Laporan	213,143,500.00	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	234,457,850	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi		100%	90,000,000.00			100%	99,000,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jalan El Tari Nomor 52 Kota Kupang	1 kendaraan 4 Roda Kendaraan Roda 2	16,571,750,00	Dana Alokasi Umum		1 kendaraan Roda 4	18,228,925	
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi	Jalan El Tari Nomor 52 Kota Kupang	12 unit	90,000,000.00	Dana Alokasi Umum		15 Unit	99,000,000	
		Persentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	45,45%	16,571,750.00	Dana Alokasi Umum		51,51%	18,228,925	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026 serta pertanggung jawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* dan *clean government* yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.